

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan politik di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat, diawali dengan politik pada era orde baru yang bersifat sentralistik dan otoriter hingga era reformasi yang bersifat demokrasi, dimana adanya pemberian kebebasan seluas-luasnya untuk berpendapat dan membuat kelompok. Pesatnya perkembangan pemilu di Indonesia juga dapat dirasakan hingga ke level pemerintah daerah.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab IV mengatur bagaimana penentuan kepala daerah yang berbunyi Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Undang-undang ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di Indonesia, Pilkada tersebut dilaksanakan semata-mata bertujuan untuk

menentukan pemimpin daerah yang berkualitas, amanah, akuntabel dan mengutamakan kepentingan rakyat di daerahnya.

Wibawanto, dkk (2005:1) menjelaskan bahwa jabatan kepala daerah tidak lagi ditentukan oleh Dewan Pemilihan Rakyat Daerah (DPRD), calon kepala daerah yang terpilih kedepannya tidak akan mendapatkan dominasi dari DPRD, melainkan posisi kepala daerah dan DPRD akan berjalan seiringan dan sederajat serta keduanya dapat bekerjasama sebagai mitra kerja di dalam pemerintahan.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Indris (2010:2) menjelaskan bahwa penentuan calon kepala daerah tidak lepas dari peranan partai politik, ataupun gabungan dari beberapa partai politik yang disebut dengan koalisi partai politik, ketentuan ini diubah dengan UU no 12 tahun 2008 yang berbunyi peserta pilkada juga dapat berasal dari perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Partai politik atau koalisi partai dapat mendaftarkan pasangan

kandidat tersebut bila memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu legislatif di daerah bersangkutan, seperti yang teruang dalam pasal 59 ayat 2 UUD no 12 tahun 2008.

Pemilukada serentak yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015 merupakan kebijakan baru yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilukada di Indonesia. Pemilukada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diikuti oleh 3 kabupaten yakni di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari 269 daerah yang melaksanakan pilkada secara serentak, pilkada ini dilaksanakan di 1.768 Tempat Pemilihan Suara (TPS), dan diikuti oleh 685.920 Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dimana pelaksanaanya dianggarkan sebesar Rp 23.496.868.500 dan dana ini ditetapkan tanggal 15 mei 2015 setelah terbitnya Permendagri no 44 tahun 2015.

Suprapta dalam media cetak Kompasiana yang di posting pada tanggal 27 oktober 2015 mendeskripsikan bahwa pilkada di Kabupaten Bantul hanya di ikuti oleh 2 pasangan calon kepala daerah, yakni Suharsono-Abdul Halim Muslih (Suharsono-Halim) yang diusung oleh koalisi PKB, PKS, Partai Gerindra serta Partai Demokrat.

Visi yang diangkat ialah “Terwujudnya Masyarakat Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” dengan 5 misi yang mengikuti visi tersebut. Sedangkan pasangan pesaing ialah Sri Suryawidati dan wakilnya Misbakhul Munir (Ida-Munir) yang diusung oleh koalisi PDI-P, Nasdem serta didukung oleh partai Golkar dengan mengangkat visi “Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis dan Agamis” serta ada 3 misi yang mengikuti visi tersebut.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 59 ayat 2 UUD no 12 tahun 2008, partai politik atau koalisi partai dapat

mendaftarkan pasangan kandidat tersebut bila memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu legislatif di daerah bersangkutan. Berikut tabel hasil perolehan jumlah kursi DPRD masing-masing partai pada pemilu legislatif di Kabupaten Bantul pada tahun 2014 .

Tabel 1.1. Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2014

No	Partai Politik	Perolehan Kursi						Jumlah kursi	%
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6		
1	Partai NasDem	-	-	-	-	1	1	2	4.44
2	PKB	1	1	1	1	-	-	4	8.89
3	PKS	1	1	1	1	-	-	4	8.89
4	PDI Perjuangan	1	3	2	2	2	2	12	26.67
5	Partai Golkar	1	-	1	1	1	1	5	11.12
6	Partai Gerindra	2	1	1	1	-	1	6	13.33
7	Partai Demokrat	-	-	-	-	1	-	1	2.22
8	PAN	1	1	1	1	1	1	6	13.33
9	PPP	1	1	-	-	1	1	4	8.89
10	Partai Hanura	-	-	-	-	-	-	-	0
14	Partai Bulan Bintang	-	-	-	1	-	-	1	2.22
15	PKPI	-	-	-	-	-	-	-	0
JUMLAH		8	8	7	8	7	7	45	100

Sumber : KPU Kabupaten Bantul

Dari tabel diatas perolehan kursi partai pengusung Suharsono-Halim yakni PKB memiliki 4 kursi di DPRD, sedangkan Partai Gerindra memiliki 6 suara di DPRD. Begitu pula dengan partai politik pengusung koalisi Ida-Munir yakni PDIP yang memiliki 12 kursi, dan partai Nasdem yang memiliki 2 kursi di DPRD.

Berdasarkan perolehan kursi di DPRD tersebut, semua partai politik yang mengusung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilukada tahun 2015 sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk membuat sebuah koalisi. Sedangkan untuk perolehan suara sah dari setiap partai politik yang mengikuti pemilu legislatif DPRD tahun 2014 di Kabupaten Bantul terlampir dalam tabel berikut :

Tabel 1.2. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2014

No	Partai Politik	Perolehan Kursi						Jumlah Suara Sah	%
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6		
1	Partai NasDem	3.368	3.444	2.841	5.595	6.152	10.672	32.072	5.72
2	PKB	15.617	6.102	16.520	10.012	5.977	3.295	57.523	10.26
3	PKS	8.086	7.706	7.233	8.269	5.128	5.679	42.101	7.51
4	PDI-P	17.517	29.583	19.912	28.228	28.875	27.321	151.436	27.01
5	Partai Golkar	6.812	4.765	7.058	7.958	9.336	6.353	42.282	7.54
6	Partai Gerindra	19.052	13.872	17.674	8.882	4.660	11.434	75.514	13.47
7	Partai Demokrat	4.420	3.649	4.349	4.185	6.600	5.181	28.384	5.06
8	PAN	12.269	12.507	8.259	14.780	12.887	8.933	69.635	12.41
9	PPP	6.290	7.749	5.157	4.934	6.769	7.108	38.007	6.78
10	Partai Hanura	2.010	2.004	901	1.817	3.451	850	11.033	1.97
14	PBB	844	558	261	5.988	2.958	493	11.102	1.98
15	PKPI	321	173	117	254	523	250	1.638	0.29
JUMLAH		96.606	92.112	90.282	100.842	93.316	87.569	560.727	100

Sumber : KPU Kabupaten Bantul tahun 2014

Pelaksanaan pilkada di Kabupaten Bantul pada awalnya dikhawatirkan mengalami kemunduran, karena menjelang berakhirnya masa pendaftaran kepala daerah hanya ada satu pasangan saja yang sudah yakin mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati yakni pasangan Ida-Munir.

Majunya pasangan Suharsono-Halim ini mampu memupuskan kekhawatiran tertundanya pilkada di Kabupaten Bantul, meskipun begitu majunya pasangan Suharsono-Halim tidak terlepas dari rumor yang tidak baik, pasangan ini dianggap sebagai calon boneka yang sengaja dimunculkan oleh kubu pasangan Ida-Munir.

Kemunculan isu calon boneka ini berawal dari belum adanya titik temu komunikasi politik yang dibangun antara partai-partai di Kabupaten Bantul, padahal purnawirawan polisi yang pernah bertugas di mabes polri ini sudah jauh-jauh hari berupaya mencari partai pendukung dan pasangan bakal calon wakil bupati, selain itu pasangan petahana dianggap terlalu kuat dan sulit untuk ditandingi.

Mendengar rumor yang beredar menjelang pilkada tersebut berlangsung, Suharsono dalam detik.com membantah tegas anggapan dirinya sebagai calon boneka, dengan tegas dan mengucap sumpah ia menyatakan sebuah bantahan terkait rumor tersebut selepas

mendaftarkan diri di KPU Bantul pada Selasa 28/7/15 yang dikemukakan oleh Afifi

“Demi Allah, saya ini orang Islam. Saya tidak ada niatan menipu. Demi Allah saya siap bertarung dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menang dalam pilkada. Kita sudah bentuk tim, kita atur strategi. Melawan incumbent bukan berarti menyuatkan nyali saya. Saya kira rakyat Bantul sudah cerdas, jadi rumor itu tidak akan berpengaruh”

Dari hasil pemilukada yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bantul pada tahun 2015 yang lalu, kemenangan diraih oleh Koalisi pasangan Harsono-Halim dengan suara terbanyak yaitu sebesar 261.412 suara atau 52,8%. Sedangkan perolehan suara koalisi pasangan pesaing yaitu pasangan Ida-Munir sebesar 233.677 suara atau 47,2%. Hasil kemenangan tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 1.3. Hasil suara Pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015

No	Pasangan Calon	Partai Koalisi	Hasil Suara	Presentase (%)
1	Suharsono - Abdul Halim Muslih (Suharsono-Halim)	PKB, PKS, Partai Gerindra Partai Demokrat.	261.412	52,8
2	Sri Suryawidati - Misbakhul Munir (Ida-Munir)	PDI-P, Partai Nasdem, Partai Golkar.	233.677	47,2

Perolehan suara pada pemilu pada tahun 2015 di Kabupaten Bantul ini cukup membuat masyarakat kaget, hal tersebut dikarenakan pasangan petahana ini dapat dikalahkan oleh pendatang baru yang merupakan purnawirawan dari kepolisian, dimana AKBP Suharsono tidak pernah sama sekali menempati posisi jabatan struktural (jabatan dalam pemerintahan) maupun jabatan politik di sebuah partai berbeda dengan wakilnya yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB.

Kemampuan Suharsono-Halim mengalahkan Pasangan Petahana menjadi hal yang cukup mengejutkan pihak lawan (Ida-Munir), karena pihak lawan merasa koalisi yang mengusung pasangannya merupakan Koalisi yang memiliki basis masa cukup banyak di Kabupaten Bantul. Ida juga merupakan Bupati Kabupaten Bantul yang masih menjabat pada Periode 2010-2015, dan memutuskan mencoba peruntungan kembali dalam pilkada untuk periode 2015-2020 sebagai pasangan

Petahana, sehingga dapat dipastikan hasil suara terbanyak akan tetap berada di posisi pasangan Ida-Munir.

Pada hasilnya pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015 membuktikan bahwa kemenangan tidak berada di posisi Ida-Munir melainkan berada pada kubu Suharsono-Halim. Hasil pemilukada di Kabupaten Bantul tahun 2015 ini membuat peneliti tertarik ingin melakukan penelitian terkait faktor kemenangan koalisi partai politik yang mengusung calon kepala daerah. Koalisi yang mengusung kemenangan Suharsono-Munir merupakan bentuk koalisi campuran dimana partai-partai yang tergabung dalam koalisi tersebut memiliki ideologi yang berbeda, PKB dan PKS merupakan partai dengan Ideologi Islam (partai agamis), partai Gerindra dengan ideologi Nasionalis, dan partai Demokrat merupakan partai dengan ideologi Nasionalis Agamis.

Oleh karena itu penulis mengambil penelitian tesis dengan judul **“Faktor Kemenangan Koalisi Suharsono-Halim dalam Pemenangan Pemilu Kepala Daerah**

Kabupaten Bantul Tahun 2015”. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bantul, alasan pengambilan lokasi tersebut karena dari 5 Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Bantul memiliki fenomena yang unik dalam proses penyelenggaraan pemilu disetiap periodenya.

Salah satu fenomena yang akrab di masyarakat Kabupaten Bantul yakni adanya politik dinasti, dimana dalam beberapa periode terakhir kepemimpinan bupati Bantul di pegang oleh sebuah keluarga dengan partai tunggal sebagai satu-satunya partai pendukungnya. Namun pada pilkada pada Kabupaten Bantul tahun 2015 ini politik dinasti tersebut berhasil terhenti dengan kemenangan pasangan purnawirawan polri yakni Suharsono-Halim mengalahkan pasangan petahana yakni Ida-Munir.

Tidak hanya itu pemilihan Kabupaten Bantul sebagai lokasi penelitian juga di karenakan geografis yang dimiliki penduduk Kabupaten Bantul beragam, ada

beberapa penduduknya yang tinggal di daerah dataran tinggi seperti di Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, ada juga yang tinggal di sekitar pantai (pesisir), dan ada juga yang tinggal bersebelahan dengan Kota Yogyakarta yakni pada Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Sewon, serta Kecamatan Kasihan.

Dengan beragam nya lokasi tempat tinggal penduduk di Kabupaten Bantul ini, maka beragam pula pemikiran politik yang dimiliki oleh masyarakat tersebut sehingga fenomena politik pada pemilihan kepala daerah dan strategi yang digunakan partai politik ataupun calon bupati untuk meraih suara menjadi semakin menarik untuk diteliti.

1.2. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang diatas peneliti merumuskan permasalahan yang ingin di teliti, yakni *“Faktor apa saja yang mempengaruhi kemenangan koalisi Suharsono-Halim dalam pemenangan pemilu kepala daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015”*

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis dan memahami faktor apa saja yang mempengaruhi kemenangan koalisi Suharsono-Halim dalam pemenangan pilukada Kabupaten Bantul tahun 2015.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Dapat memperkaya dan menambah pengetahuan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi kemenangan koalisi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemenangan pilukada, serta sebagai tambahan kajian khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan

- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan informasi untuk penelitian selanjutnya tentang faktor kemenangan koalisi dalam pilukada.

2. Secara Praktis

- a. penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sumber informasi atau bahan masukan bagi semua partai politik dan pihak-pihak yang terkait untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kemenangan koalisi Suharsono-Halim dalam pemenangan pilukada Kabupaten Bantul tahun 2015.
- b. Dapat dijadikan referensi atau pedoman bagi penelitian selanjutnya tentang faktor kemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemenangan pemilu secara umum dan pemenangan pilukada secara khusus.